

## Optimalisasi Perpanjangan Buku Pelaut Online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Syahira<sup>1</sup>, Iing Mustain<sup>2\*</sup>, Elis Suswati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon,

Jl. Jend. Sudirman No. 156 Cirebon, Indonesia

\*email korespondensi: [iing.mustain@akmicirebon.ac.id](mailto:iing.mustain@akmicirebon.ac.id)

### Abstract

Previously, the Seaman Book Service at the Special Port Authority of Batam (KSOP) was still manual. Along with the development of information technology, the Seaman Book service is now online. However, online services still need to be optimized because of obstacles. The research method uses a descriptive qualitative approach. The research location was at the Harbormaster's Office and the Special Port Authority of Batam in the Ship's Seaworthiness Sector, Ship's Legal Status Section. Sampling was conducted on seaman books that applied for extensions from 240 applications; 24 samples were taken. Data collection techniques were by observation, interviews, and documentation. The research period was from February to August 2023. The study results showed that the online seaman book extension service at the Special KSOP Batam averaged 210 - 246 seaman books. In optimizing the seafarer's book extension service, both from system disruptions and lack of understanding from seafarers, efforts can be made by manually making the seaman book online again, and for those who do not understand the information, directions, and socialization can be given regarding the online seaman book extension, work time discipline, and adding people to the service section. The provision of adequate facilities for seaman book services, service provision, and adequate service facilities and infrastructure standards must also be set by public service providers.

**Keywords:** *Seman Book, KSOP Batam, online, optimization*

### Abstrak

Layanan Buku Pelaut pada KSOP Khusus Batam sebelumnya masih bersifat manual. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini layanan Buku Pelaut menjadi bersifat online. Namun layanan bersifat online masih diperlukan optimalisasi karena terdapat kendala. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada Bidang Kelaiklautan Kapal Seksi Status Hukum Kapal. Pengambilan sampel dilakukan pada buku pelaut yang mengajukan perpanjangan dari 240 pengajuan diambil 24 sampel. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Waktu penelitian dari bulan Februari hingga Agustus 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil layanan perpanjangan buku pelaut secara online pada KSOP Khusus Batam rata-rata berjumlah 210 – 246 buku pelaut. Dalam mengoptimalkan layanan perpanjangan buku pelaut baik itu dari gangguan sistem dan kurang pemahaman dari pelaut bisa dilakukan upaya dengan di manualkan buku pelautnya baru di online-kan lagi, dan untuk kurang pemahannya tentang informasi bisa diberikan arahan dan sosialisasi tentang perpanjangan buku pelaut online, kedisiplinan waktu kerjanya, dan penambahan orang dibagian layanan. Pemenuhan fasilitas yang memadai untuk pelayanan buku pelaut, penyelenggaraan pelayanan dan juga harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

**Kata Kunci:** *Buku Pelaut, KSOP Batam, online, optimalisasi*

## PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi informasi terus mengalami kemajuan pesat, terutama bidang maritim (Hartanto et al., 2021). Hal ini terlihat dari kemudahan dalam pertukaran informasi antara individu melalui media sosial dan platform lain yang terhubung melalui internet (Kartini et al., 2022; Astriawati et al., 2022). Jaringan internet memungkinkan setiap orang untuk saling berbagi informasi dengan mudah, tanpa batasan waktu dan lokasi (Sari et al., 2018).

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak pada sistem Buku Pelaut di Indonesia (Putra et al., 2025), dimana sistem yang sebelumnya menggunakan Buku Pelaut manual telah berubah menjadi Buku Pelaut *online* (Wanuri et al., 2023; Sutriana, 2022). Beberapa pelaut merasa bahwa penerapan sistem Buku Pelaut online melalui digitalisasi efektif dan efisien (Wijaya, 2023). Namun, ada juga pelaut yang menghadapi kendala dalam mengadopsi sistem buku pelaut *online* sebagai bagian dari digitalisasi. Kendala-kendala seperti kurang pemahaman dalam pengoperasian sistem, kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi, serta faktor-faktor lain yang menghambat pelaut dalam menghadapi sistem Buku Pelaut *online*.

Buku Pelaut merupakan sebuah dokumen resmi Negara yang mencatat berbagai catatan ataupun *track record* pelaut (pengalaman seorang pelaut saat berlayar). Buku pelaut juga dikenal dengan istilah *seaman book*, hal ini dikarenakan dapat digunakan pula bagi pelaut internasional. Agar pelaut Indonesia terlindungi hak serta kewajibannya maka disahkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjadi dasar peraturan (UU RI, 2008).

Di samping itu, program pembuatan buku pelaut secara *online* ini bertujuan untuk mendata jumlah pelaut Indonesia ke dalam *database* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan bagi para pelaut Indonesia. perubahan ini merupakan langkah maju dalam sektor pelayaran di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi alasan agar pelaksana pelayanan publik bisa memberikan pelayanan yang optimal (Prasetiawan et al., 2024).

Penerapan sistem pelayanan *online* masih ditemukan beberapa hambatan bagi pengguna jasa seperti kesulitan mengakses situs pelayanan perpanjangan buku pelaut dan kurangnya sosialisasi dari pihak syahbandar dalam hal pelayanan perpanjangan buku pelaut berbasis *online*, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mampu menjangkau sistem *online* tersebut seperti pengguna jasa yang memiliki usia produktif dan mahasiswa pelayaran. Sehingga perlu optimalisasi dalam layanan perpanjangan buku pelaut bagi kalangan pemula.

Mengingat pelayanan tersebut telah menggunakan pelayanan berbasis *online* dan sistem pelayanan satu atap sehingga dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: (1) Identifikasi Persyaratan, (2) Identifikasi Prosedur, (3) Identifikasi Waktu, (4) Identifikasi Biaya/Tarif, (5) Identifikasi Produk Pelayanan, (6) Penanganan Pengadaan Pengaduan. Adapun kekurangan dari pelayanan perpanjangan buku pelaut berbasis *online* terdapat di beberapa indikator yang perlu ditingkatkan seperti identifikasi waktu dan penanganan pengadaan pengaduan.

Penelitian terdahulu telah membahas tentang pelayanan buku pelaut di kantor pelabuhan diantaranya prosedur pelayanan dan penerbitan buku pelaut secara *online* di kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari (Pattiasina, 2020). Hasilnya ditemukan bahwa penerbitan buku pelaut secara *online* tentunya sudah sesuai dengan SOP. Adapun terjadinya kecepatan dan keterlambatan penyelesaian waktu pelayanan dapat bergantung pada beberapa aspek pendukung (Setiyantara et al., 2022). Sedikitnya pengguna jasa yang melakukan pendaftaran *online* dan berjalannya server atau jaringan dengan baik serta keaktifan pengguna jasa dalam menyelesaikan proses pendaftaran buku pelaut dan pembayaran. Sementara menurut Ningrum et al., (2022) dalam penelitiannya bahwa kelebihan dalam penerbitan *seaman book* secara *online* yaitu lebih efisien dalam penanganannya daripada sistem manual dan keamanan data dari *seaman book online* lebih aman, karena semua data milik pelaut sudah terekam dalam sistem.

Penggunaan sistem *online* dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penerbitan, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,026 dan 0,035 (Putra et al., 2025). Sedangkan hasil penelitian Wanuri et al., (2023) bahwa hambatan yang sering terjadi dalam sistem informasi pembuatan buku pelaut pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe adalah koneksi internet/jaringan internet yang lambat, lupa password, lupa akun dan lupa email yang pernah terdaftar di situs <https://pelaut.dephub.go.id>. Dan kurangnya sosialisasi kepada pengguna jasa, pihak Syahbandar tidak melakukan hal tersebut sebab tidak ada instruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Maka dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya penelitian ini difokuskan pada bagaimana optimalisasi layanan perpanjangan buku pelaut online di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.

Dari wacana diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi layanan perpanjangan buku pelaut online pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Selain itu, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan layanan perpanjangan buku pelaut online di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014). Tempat penelitian dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam pada Bidang Kelaiklautan Kapal Seksi Status Hukum Kapal Dan Kepelautan bagian pemroses data status kapal khususnya bagian pembuatan buku pelaut dan perpanjangan. Pengambilan sampel dilakukan pada buku pelaut yang mengajukan perpanjangan dari 240 pengajuan diambil 24 sampel. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel pelaut, agen pelayaran dan petugas KSOP Khusus Batam. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan februari sampai agustus 2023. Teknik analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi dilakukan di KSOP Khusus Batam dengan pertimbangan adanya layanan buku pelaut yang segmen penggunaannya besar berdasarkan pengamatan selama dilakukan kegiatan penelitian. Sehingga dengan jumlah pengguna yang banyak perlu mengambil langkah solutif untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan hambatan yang terjadi. Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan respon langsung dari salah satu petugas KSOP Khusus Batam dan pengguna buku pelaut *online*. Untuk menguatkan hasil observasi dan hasil wawancara, dilakukan pengambilan dokumentasi berupa photo saat dilakukan pengumpulan data di lokasi KSOP Khusus Batam.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengurusan Perpanjangan Buku Pelaut**

Buku pelaut dapat diurus oleh pengguna jasa seperti nakhoda, *crew* kapal, kadet, dan agen pelayaran kapal maupun taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di atas kapal. Kriteria untuk mengurus buku pelaut yaitu dapat diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut (ATT/ANT) dan sertifikat keterampilan pelaut (BST, RATING, ABLE).

Dalam pengurusan perpanjangan buku pelaut secara online pengguna jasa juga wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Adapun persyaratan yaitu sebagai berikut :

- a. Teregistrasi secara online melalui website <http://pelaut.debhub.go.id>
- b. KTP/KK/Akta kelahiran (asli dan fotocopy)
- c. *Basic safety Training* (BST asli dan fotocopy)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Pasal 22 ayat (1,2 dan 3) Biaya/tarif Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab negara dan/atau Masyarakat. Biaya/tarif Pelayanan Publik yang merupakan tanggung jawab negara dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan (Munawar dkk, 2021). Selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibebankan kepada penerima Pelayanan Publik dengan memperhatikan, yaitu:

- a. Kondisi ekonomi sosial dan daya beli Masyarakat.
- b. nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa.
- c. biaya operasional dalam proses produksi pelayanan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenpanRB, 2004) Nomor 63 Tahun 2004 Penetapan Biaya Pelayanan perlu memperhatikan antara lain:

1. Besaran biaya yang layak
2. Kemampuan ekonomi masyarakat setempat
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undang
4. Tingkat kesulitan proses pelayanan dan kegunaan produk pelayanan.

Layanan perpanjangan buku pelaut dikenakan tarif, disetorkan kepada kas Negara pada Sub Direktorat Kepelautan sebagai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan besaran tarif ini ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang jenis PNPB Kementerian Perhubungan biasanya untuk Penerbitan perpanjangan buku pelaut dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000 dan biaya tersebut langsung disetor ke bank yang telah ditunjuk dengan memperlihatkan kode billing. dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Data pengurusan perpanjangan buku pelaut tahun 2023

No.	Nama Bulan	Fungsi
1.	Februari	210 buku pelaut
2.	Maret	230 buku pelaut
3.	April	246 buku pelaut
4.	Mei	240 buku pelaut
5.	Juni	236 buku pelaut
6.	Juli	230 buku pelaut

Sumber : Data bulanan perpanjangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa pelayanan dalam pengurusan perpanjangan buku pelaut pada bulan maret, April dan mei terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil yang penulis lakukan, terjadi peningkatan pada bulan tersebut dikarenakan pada bulan tersebut terdapat hari-hari besar yang membuat pelaut dan agen banyak melakukan perpanjangan buku pelaut.

Hasil dari wawancara penulis dengan salah satu agen kapal yang mengurus perpanjangan buku pelaut dapat dianalisa bahwa banyak pengguna jasa yang melakukan pengurusan perpanjangan buku pelaut pada bulan – bulan tertentu sehingga terjadi peningkatan pengurusan perpanjangan buku pelaut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

**a. Biaya pelayanan / tarif**

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola dan juga harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

**b. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan**

Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu. Hal tersebut perlu ditetapkan sebagai standar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, mengenai perpanjangan buku pelaut yang dilakukan pada seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan peneliti melihat petugas pemberi pelayanan sudah sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal tersebut didasarkan pada beberapa staf yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknis dan kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam menegaskan bahwa petugas pemberi pelayanan terkhusus pada bagian pelaksana teknis seperti seksi Status hukum kapal dan kepelautan, tentu harus memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas pemberi pelayanan kepada pengguna jasa memang harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam hal kepelautan agar pelayanan yang diberikan tidak mengalami hambatan internal hanya karena kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh petugas pemberi pelayanan.

**c. Sarana dan Prasarana**

Selain itu sarana dan prasarana yang disediakan pada ruangan pelayanan sudah optimal dan cukup memadai. Seperti sudah ada *banner* yang menjelaskan langkah-langkah proses perpanjangan buku pelaut, ketersediaan ruang tunggu yang nyaman terdapat kursi yang cukup banyak untuk pengguna jasa, penyejuk ruangan, dispenser air untuk minum dan ada juga televisi untuk media hiburan.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa sarana dan prasarana ini sangat penting untuk meningkatkan rasa nyaman pengguna jasa dan kemudahan dalam proses pelayanan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup, kebutuhan pengguna jasa akan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan dan proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

**Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan perpanjangan buku pelaut online.**

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan perpanjangan buku pelaut secara online dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu faktor system dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Sistem

Adanya gangguan pada server buku pelaut. Untuk gangguan sistem, kita tidak ada yang tau kapan akan terjadi gangguan system, Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan layanan perpanjangan buku pelaut online, yaitu dengan cara membuat buku pelaut yang *online* tersebut menjadi manual dengan cara di tulis tangan dan di cap *online*, kemudian setelah system nya bagus kembali akan diinput data pelaut tersebut ke sistem buku pelautnya dan kemudian pelaut membayar billing PNPB negara untuk menerima buku pelaut tersebut.

## 2. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Kurangnya pemahaman dari pelaut terhadap system buku pelaut online  
Untuk kurangnya pemahaman dari pelautnya, Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menjelaskan kepada pelautnya mulai dari tahap-tahapnya, tarif dan pengajuannya, selain itu dengan cara mengadakan sosialisasi tentang proses perpanjangan buku pelaut kepada pelaut dan agen pelayaran.
- b. Kurangnya Jumlah Pegawai bagian pelayanan buku pelaut  
Untuk Kurangnya pegawai bagian pelayanan, Upaya yang dilakukan bisa meminta bantuan dengan bagian pencetakan buku pelaut yang bagian dalam untuk membantu sehingga pelayanan menjadi optimal.
- c. Kurang disiplinnya waktu  
Untuk Disiplin waktu, Upaya yang dilakukan dengan datang lebih awal agar tidak ada keterlambatan lagi dan bisa mengoptimalkan pekerjaan yang ada.

## SIMPULAN

Hasil layanan perpanjangan buku pelaut secara *online* pada KSOP Khusus Batam rata-rata berjumlah 210 – 246 buku pelaut yang menunjukkan jumlah setiap bulannya cukup banyak. Dalam mengoptimalkan layanan perpanjangan buku pelaut baik itu dari gangguan sistem dan kurang pemahaman dari pelaut bisa dilakukan upaya dengan di manualkan buku pelautnya baru di *online*-kan lagi, dan untuk kurang pahamnya tentang informasi bisa diberikan arahan dan sosialisasi tentang perpanjangan buku pelaut online, kedisiplinan waktu kerjanya, dan penambahan orang di bagian layanan. Pemenuhan fasilitas yang memadai untuk pelayanan buku pelaut, penyelenggaraan pelayanan dan juga harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astriawati, N., Santosa, P. S., Wibowo, W., Hartanto, B., & Setiyantara, Y. (2022). *Indonesian Maritime E-Leadership Training Towards A Digital-Based Marine Transportation System*. International Journal Of Community Service (Ijcs), 2(4), 435–441.
- Hartanto, B., Astriawati, N., Wibowo, W., & Sisdiyanto, D. (2021). *Pengenalan Teknologi Navigasi Bidang Maritim Melalui Virtual Outing Untuk Anak-Anak Jogjakarta Montessori School*. Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 5(1), 963–967.
- Kartini, K., Harahap, I. A., Arwana, N. Y., & Rambe, S. (2022). *Teori Dalam Penelitian Media*. Jurnal Edukasi Nonformal.
- Menpanrb. (2004). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M. Mpa Ri, 2, 2004*.
- Ningrum, N. L., Satriyo, G., & Wahyudi, I. K. (2022). *Implementasi Sistem Penerbitan Seaman Book Berbasis Online Dalam Penggantian Awak Kapal*. Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi, 4(2), 59–69.

- Pattiasina, P. (2020). *Prosedur Pelayanan Dan Penerbitan Buku Pelaut Secara Online Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari*. *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 3, 271–275.
- Prasatiawan, S. T., Widyanto, H., Azria, F., & Astriawati, N. (2024). *Optimalisasi Prosedur Pelayanan Kapal Oleh Pt. Salam Pasific Indonesia Lines*. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 22(1), 75–87.
- Putra, D. B. Y., Sianturi, I., Asdiana, F., & Rahmawati, M. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Buku Pelaut Online Terhadap Proses Penerbitan Buku Pelaut Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya*. *Jurnal Maritim Malahayati*, 6(1), 302–308.
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). *Komunikasi Dan Media Sosial*. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Setiyantara, Y., Pertiwi, Y., Astriawati, N., Kusuma, A. C., & Putra, I. P. (2022). *Analisis Pemeriksaan Kapal Oleh Marine Inspector Pada Ksop Kelas Iv Probolinggo*. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 24(2), 114–122.
- Sugiyono. (2014). *Teknik Pengumpulan Data*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. <https://doi.org/10.3354/dao02420>
- Sutriana, L. (2022). *Sistem Informasi Buku Pelaut Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Kelautan*. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 8(2), 96–107.
- Uu Ri. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.
- Wanuri, B. D., Satriyo, G., Khoiruman, M. A., & Komanireng, J. B. (2023). *Prosedur Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi*. *Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi*, 5(2), 82–90.
- Wijaya, F. M. T. (2023). *Persepsi Pelaut Terhadap Sistem Buku Pelaut Online Menggunakan Analisis Tam (Studi Kasus Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Tahun 2023)*. *Politeknik Pelayaran Surabaya*.